



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Alpian Basri Bin Herman, , tanggal lahir 27 Desember 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lamantang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Jumarnawati, A.Md. Keb Binti Basri, tanggal lahir 05 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 342/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 10 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2013, di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



- berdasarkan Akta Nikah Nomor : 525/73/XI/2013, tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan belum dikaruniai anak namun telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dhukul);
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2018, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena pada saat itu termohon ketahuan selingkuh lewat media sosial, kemudian pemohon mempertanyakan hal tersebut kepada termohon, namun termohon lebih memilih marah dan bertengkar dengan pemohon, sejak kejadian itu termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
 6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;
 7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Alpian Basri Bin Herman untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Jumarnawati, A.Md. Keb Binti Basri di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal tanggal 20 Juni 2019 dan 3 Juli 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Tentang perdamaian dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. **Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/13/XI/2013, tanggal 12 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama **Ahmad Nursam bin Satta**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Lamantang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-maraha.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon marah-maraha kepada Pemohon bahkan menagncam dengan parang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Saksi kedua bernama **Sulfadli bin Muh. Saleh**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Lamantang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marrah.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon marah-marrah kepada Pemohon bahkan menagncam dengan parang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama keduanya tidak saling mempedulikan lagi..

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah Nomor 525/13/XI/2013 tanggal 12 November 2013, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering meningaalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menjalin

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti.
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **Sulfadli bin Muh. Saleh** dan saksi **Ahmad Nursam bin Satta**, masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak sekarang sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah kepada Pemohon bahkan mengancam dengan parang.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama selama 5 bulan sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Termohon harus dinyatakan terbukti.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah kepada Pemohon bahkan mengancam dengan parang.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan mengancam dengan

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



parang, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon masih berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon namun Termohon sudah tidak menginginkan lagi hidup dengan Pemohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratannya maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga tuntutan pokok Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Alpian Basri Bin Herman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumarnawati, A.Md. Keb Binti Basri) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. dan St. Hatijah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI..

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk



Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
-	Proses	Rp 50.000,00	
-	Panggilan	Rp 545.000,00	
-	Redaksi	Rp 10.000,00	
-	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>	
	Jumlah	Rp 641.000,00	(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Blk